

HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI  
KEBANGKITAN EMPAT PARTAI KONSERVATIF  
DI EMPAT NEGARA EROPA TAHUN 2010 – 2016

JURNAL



Disusun Oleh :

**Ardy Zainuddin**

(20130510160)

Yang disetujui oleh :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sugito", is written over a horizontal line. The signature is fluid and stylized.

Sugito, S.IP., M.Si.  
Dosen Pembimbing Skripsi

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

# **KEBANGKITAN EMPAT PARTAI KONSERVATIF DI EMPAT NEGARA EROPA TAHUN 2010 – 2016**

**(The Resurgence of Four Conservative Parties in Four European Countries from 2010 to 2016)**

Ardy Zainuddin

20130510160

ardhy.zainuddin@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

## Abstract

All the conservative parties in Europe; French, Nedherland, Germany, Italy, and others of European Union members have been taking many advantages from any problems in European Union since 2000 until 2016. All of the problems, not only from internal problem, but also from external problem that occured by European Union become a weapon for a conservative party to get back their society support in Europe. The increasing of unemployment from all of European Union members and austerity policy create a great momentum for conservative group to support anti-euro in Europe society and eurosceptic in order to go out from European Union, then become an independent country as like as in the conservative theory from Edmun Burke. He said that an ideal society is a good organize society (Burke, 1968). In order to create an ideal society, it needs a government that has a dependent power and right policy that will ensure the same treatment for every individuals. Not only from internal problem of European Union, the problem also comes from the external that support a conservative party resurgence, for example is many muslim immigrants come to European. It makes an impact of multiculturalism failure in Europe that influence a discriminatory action in the society and appears a radicalism action from minority groups. This problems trigger an islamphobia phonomenon in Europe society.

---

Keyword: *Conservative, Eurosceptic, Islamophobia, European Union*

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini partai-partai elit Uni Eropa mulai berlomba-lomba meraup suara masyarakat di Eropa, dengan mengusung berbagai paket-paket kebijakan yang tentunya dapat menarik suara-suara yang ada. Dan jika berbicara perpolitikan di negara-negara Eropa maka tidak asing bagi kita mendengar kata Konservatif, kelompok sayap kanan, atau bahkan kelompok nasionalis yang jika diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia kon'ser'va'tif atau konservatif diartikan sebagai Kolot dan Tradisional lalu sering diartikan sebagai sikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku (KBBI, 2017). Maka dapat dijelaskan bahwa kelompok konservatif ialah sekumpulan orang yang terus tetap mempertahankan politik-politik tradisional yang ada.

Dan dalam pelaksanaannya partai konservatif cenderung mengatur setiap anggotanya untuk memilih siapa dan siapa guna mempertahankan ideologi yang sudah lama dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Konservatif juga lebih memberikan ekstra perhatian terhadap isu-isu eksternal dalam Uni Eropa karena bagi kaum konservatif fenomena yang terjadi di Uni Eropa bukan tidak lain merupakan kelemahan serta kesalahan yang diciptakan dari lawan mereka dalam perpolitikan Eropa yaitu kelompok sayap kiri atau partai-partai liberal demokrat yang merupakan penguasa politik Eropa saat ini dan juga fenomena yang terjadi di Eropa ialah sebuah titik balik dari kebangkitan para partai konservatif di Uni Eropa, Sedangkan istilah sayap kanan dan kiri di Eropa merupakan sebuah istilah yang aslinya berasal dari pengaturan tempat duduk para dewan legislatif pada masa Revolusi Perancis, yang ketika kaum monarkhis yang mendukung Ancien Regime biasanya disebut sebagai kaum kanan karena mereka duduk di sebelah kanan di ruangan dewan legislative, namun acuan ini kini telah usang, makna istilahnya pun telah berubah sesuai dengan spektrum dan gagasan dan sikap yang diperbandingkan, dan sudut pandang si pembicaranya.

Belakangan ini, istilah ini hampir selalu mencakup suatu bentuk konservatisme, dan di Barat termasuk kelompok demokrat kristen. Di dalam politik internasional, kelompok sayap kanan atau kelompok kanan Konservatif merupakan istilah yang mengarah kepada segmen politik yang biasanya selalu dikaitkan dengan Konservatisme, Liberalisme Klasik, Kelompok Kanan Agama, atau sekedar sebagai lawan politik dari kelompok sayap kiri. Dalam konteks tertentu, terkadang istilah kelompok kanan juga bisa mencakupi nasionalisme otoriter, namun hal itu biasanya lebih merupakan bagian dari kelompok ekstrem kanan (Denny.J.A., 2006).

Namun paska perang dunia ke 2 tahun 1945 sampai awal tahun 2000an kelompok konservatif seakan memberikan grafik penurunan yang signifikan didalam perpolitikan di Uni Eropa. Terbukti Kelompok sayap kanan sejak tahun 1950an sampai awal tahun 2000an seakan tertekan dan terpuruk dengan isu demokrasi yang digadang-gadang oleh para kaum liberal di kelompok sayap kiri. Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh kelompok sayap kanan dalam menyatukan kembali kelompok-kelompok sayap kanan yang sudah terpecah dan tertinggal oleh kelompok sayap kiri. Namun Usaha menyatukan kekuatan ekstrem kanan untuk bergabung pada tingkat Eropa sudah dilangsungkan sejak awal 1950-an, dan tidak pernah berhasil. Pada 70-an, pernah muncul slogan "Euro-kanan" untuk menanggapi "Eurocommunism". Pada pertengahan 1980-an, partai Front Nasional di parlemen Eropa, dengan partai-partai nasionalis Italia dan Yunani, mencoba membentuk platform "Eropa Kanan" yang dipimpin oleh pendiri Front Nasional Jean-Marie Le Pen, ayah Le Pen. Pada tahun 2007, mereka mencoba membentuk kekuatan kelompok dengan platform "Identitas, Tradisi, Kedaulatan" dalam parlemen Uni Eropa, tapi juga gagal karena perselisihan internal.

Kelompok-kelompok ini tidak akan memiliki kekuatan "untuk menggagalkan kesatuan Eropa." Tapi mereka bisa mempengaruhi arah kebijakan yang spesifik, seperti suaka dan integrasi, jika mereka mampu untuk mendapatkan perwakilan dalam komite parlemen Eropa. Sejumlah

partai kanan dilaporkan menolak memasuki aliansi resmi dengan Front Nasional dan Partai Kebebasan. Dan bahkan jika mereka membentuk kelompok lintas-nasional, keberhasilan mereka kemungkinan akan terbatas. Dari sudut pandang teoritis, penggunaan gagasan 'identitas' diantara partai-partai beraliran kanan menjadi motivator pemilu. Ide yang berlaku adalah bahwa gerakan identitas nasionalis yang kuat dapat menemukan keberhasilan ketika diadu dengan lembaga sangat liberal seperti Uni Eropa. Dalam konteks ini, gagasan normatif demokrasi, hak asasi manusia dan kohesi sosial dianggap palsu oleh politik identitas dan mendorong kerentanan rasial dan ekonomi. Ini dapat diambil sebagai tanda bahwa tidak peduli seberapa banyak pengaruh sosial, ekonomi dan politik Uni Eropa karena pada akhirnya akan selalu ada reaksi dari pihak yang merasa tersisih dan muncul anggapan Uni Eropa sebagai distributor kesejahteraan yang tidak setara (Isharyanto, 2017).

Dengan penurunan yang terjadi membuat para petinggi-petinggi partai konservatif seperti Marine Le Pen dari Perancis, Greet Wilders dari Belanda, Frauke Petry dari Jerman serta Matteo Salvini dari Italia dan Harald Vilimsky dari Austria yang sangat-sangat Anti-Imigran Islam dan sistem yang ada di Eropa seperti Euro (mata uang bersama) dan lainnya yang kini mulai menjadikan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sebagai suatu titik balik dimana masyarakat Eropa membutuhkan kembali sosok-sosok pemimpin yang Konservatif serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih setelah dua fenomena kelompok sayap kanan lainnya seperti kemenangan Presiden Donald Trump di Amerika serta terjadinya Referendum yang dilakukan oleh Inggris. Telah membuktikan bahwa pada tahun 2016-2017 merupakan waktu kebangkitan Anglo-Saxon di negara-negara Eropa-Barat yaitu fenomena bangkitnya negara-negara tetangga eropa seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya.

Dan dengan adanya persoalan yang muncul kembali sebagai sikap nasionalisme dan etnisitas di Eropa melalui dua hal. Pertama, isu nasionalisme dan etnisitas di Eropa tidak terlepas

dari adanya perubahan dalam Eropa akibat berubahnya sistem geopolitik dan geoekonomi yang menjadi fondasi kuat terbentuknya Eropa Bersatu sebagai sebuah entitas supra-state, bahkan international state. Perubahan tersebut membawa dampak yang cukup kompleks bagi negara-negara anggotanya, salah satunya ada pada perubahan identitas warga negara dalam Uni Eropa dan dirasa perlu adanya pembentukan civil society di Eropa. Permasalahan identitas yang semakin berkembang kini menjadi isu yang sulit dengan rencana dewan Uni Eropa untuk melakukan penambahan jumlah anggota yang mencakup wilayah Eropa lainnya. Kondisi tersebut ditakutkan akan berdampak pada masalah keamanan manusia (human security), yang merupakan sebuah isu non-tradisional di benua Eropa. Nasionalisme etnis di Eropa telah berhasil menggeser isu tradisional lainnya, keamanan militer yang telah lama mendominasi perpolitikan di Eropa. Nasionalisme dan etnisitas menjadi menarik karena berkaitan dengan masalah jati diri bangsa Eropa secara keseluruhan. Dua hal yang saling bertolak belakang dalam isu nasionalisme dan etnisitas di Eropa ialah terjadinya pelemahan sikap nasionalisme di Eropa dan penguatan nasionalisme bagi pendatang di Eropa.

Kedua, persaingan ideologi antara masyarakat asli Eropa melawan para pendatang yang masuk ke Eropa membawa dampak yang dramatis bagi perkembangan Eropa; Eropa tidak saja secara sederhana terbagi dalam dua ideologi yang bertolak belakang namun berkembang menjadi dua kultur dengan kekuatan ekonomi dan kondisi sosial yang berbeda sama sekali. Sebaliknya, berakhirnya Perang Dingin juga menyebabkan perubahan signifikan bagi benua tersebut. (Wardhani, 2011)

## 2. FAKTOR KEBANGKITAN PARTAI KONSERVATIF DI EROPA

Proses kebangkitan partai konservatif yang terjadi di Uni Eropa, karena sejak Tahun 2010-2016 banyak sekali fenomena-fenomena serta isu-isu yang terjadi didalam Uni Eropa. Beberapa isu yang dimaksud seperti isu internal Uni Eropa yang muncul atas sikap skeptis masyarakat eropa (*euroseptic*) kepada Uni Eropa yang disebabkan adanya peningkatan angka pengangguran di negara-negara eropa, juga munculnya kebijakan pengetatan anggaran (*austerity*) di Uni Erupa, yang berdampak kepada sikap anti-euro di Uni Eropa. Namun dalam problematika yang terjadi di Eropa bukan hanya dari internal Uni Eropa itu sendiri, melainkan adanya isu eksternal yang juga kian memperparah permasalahan yang melanda negara-negara di Uni Eropa seperti adanya gejala peningkatan imigran yang datang dari negara-negara berkonflik untuk mencoba masuk kedalam negara di Uni Eropa. Dari peningkatan imigran inilah yang menyebabkan banyak menimbulkan ketakutan masyarakat eropa akan akulturasi migran di eropa kemudian banyaknya sikap diskriminatif masyarakat eropa kepada kelompok minoritas yang datang memaksa kelompok minoritas tersebut melaksanakan tindakan-tindakan yang radikal guna membalas perlakuan diskriminatif tersebut.

### A. Faktor Internal Di Eropa Tahun 2010-2016

#### 2.A.1 Meningkatnya Pengangguran

Banyaknya permasalahan yang tengah terjadi didalam internal Uni Eropa menjadi proses awal bagi para kelompok sayap kanan dalam mempersiapkan kebangkitan partai-partai konservatif di Eropa tahun 2016 tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan para tokoh politik konservatif dalam menjadikan momentum tersebut sebagai antisipasi perpolitikan yang telah lama terpuruk. Seperti yang dilakukan Marine Le Pen pada pemilihan umum

yang dilaksanakan di Perancis, Marine Le Pen mencoba mengangkat isu-isu tentang permasalahan tenaga kerja di Uni Eropa yang semakin lama semakin membuat perekonomian Perancis menurun.

Ada sekitar 144 program yang ditawarkan oleh Le Pen (Marine, 2017), yang mana dari sekian banyak program tersebut Le Pen mencoba membahas mengenai penghapusan pembatasan tenaga kerja di Perancis yang bertujuan untuk dapat mengangkat kembali tenaga kerja lokal di Perancis agar kedepannya dapat bersaing secara sehat dengan tenaga kerja asing yang berada didalam negeri ataupun diluar negeri. Dalam program tersebut juga Marine Le Pen menjanjikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Perancis agar dapat memberikan suara-suaranya dikarenakan jika Marine Le Pen menjadi Presiden Perancis, ia berjanji akan mengkaji dan mengatur ulang peraturan-peraturan yang membahas mengenai tenaga kerja asing. Karena bagi Le pen peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh dewan Uni Eropa dinilai sangat tidak menguntungkan bagi Perancis sebagai negara yang berdaulat.

Marine Le Pen juga mengajak seluruh golongan masyarakat Perancis untuk dapat memberikan dukungannya sehingga semua program-program yang ia rasa menguntungkan bagi masyarakat Perancis dapat segera dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Tidak terkecuali para petinggi-petinggi partai konservatif lainnya yang juga diajak untuk dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal Uni Eropa, karena bagi Le Pen permasalahan yang terjadi di negaranya tersebut tentunya juga berdampak pada negara-negara anggota lainnya. Hal itulah yang membuat Le Pen mencoba menyatukan para tokoh-tokoh elit partai konservatif di Uni Eropa untuk dapat menyatukan pikiran serta tujuan dalam menyelesaikan permasalahan internal tersebut.



*"Pemimpin Eropa harus berkumpul untuk bernegosiasi, membicarakan kegagalan euro dan penghematan, dan mulai melakukan pembubaran sistem mata uang tunggal yang diperlukan untuk mengembalikan pertumbuhan, pekerjaan dan pengurangan utang, seru Le Pen" (Armandhanu, Reuters, 2015)*

Selanjutnya isu pengangguran juga sangat berdampak pada perekonomian negara anggota Uni Eropa lainnya yaitu Italia. Dimana negara Italia dan Perancis sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dan ketiga di Eropa juga mengalami peningkatan dalam angka pengangguran hingga 10,2 persen (Rachman, 2012). Hal inilah yang membuat banyak masyarakat di Italia khususnya di Italia Utara yang mencoba untuk memisahkan diri dari negara Italia, karena bagi masyarakat Italia segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Italia dinilai hanya menguntungkan Italia di bagian bawah (selatan).

Sehingga dengan adanya rasa ketidakadilan yang muncul dikalangan masyarakat Italia Utara menjadi momentum awal bagi partai konservatif di Italia yaitu Partai Lega Nord (Liga Utara) untuk dapat menarik seluruh suara masyarakat Italia dengan menyuarakan sikap skeptisnya terhadap bergabungnya Italia didalam Uni Eropa. Salah satu tokoh elit partai konservatif di Italia ialah Matteo Salvini yang menentang keras adanya penyatuan negara-negara di benua eropa dalam kesatuan Uni Eropa. Karena bagi Salvini dengan adanya penyatuan negara tersebut akan menciptakan persaingan yang tidak sehat antara negara-negara anggota didalamnya, sebab adanya perbedaan perekonomian dari setiap negara akan sangat berdampak pada negara-negara yang masih belum mampu bersaing secara bebas tanpa ada batasan-batasan.

*"Tidak seperti Uni Soviet lalu, diamana pengangguran dan imigrasi sangat menjadi masalah yang besar. Ya untuk Eropa Baru, yang didirikan oleh para tokoh sebagai*

*penghargaan atas kerja rakyat," kata Matteo Salvini, pemimpin Partai Northern League di Italia (Armandhanu, Reuters, 2015).*

Dan dengan adanya pernyataan tersebut menjadikan Matteo Salvini sebagai perwakilan aspirasi masyarakat Italia terkhusus di bagian utara dalam menanggapi permasalahan pengangguran yang sedang melanda negara-negara anggota di Uni Eropa. Padahal jika melihat dari pertumbuhan perekonomian negara Italia, sangat jelas bahwa Italia sangat mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakatnya, hal itu bukan semata-mata asumsi dasar yang menjadi penguat persepsi mengenai meningkatnya pengangguran di Italia. Karena Italia merupakan salah satu dari tiga negara besar yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.

Peningkatan angka pengangguran di Eropa merupakan sebuah permasalahan yang dialami Negara-negara di Eropa yang mulai muncul pada tahun 2000an hingga saat ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya Negara-Negara di Eropa yang mengalami krisis ekonomi dikarenakan peningkatan pengangguran di negaranya (IRIB, 2013). Salah satu studi kasus yang paling banyak menjadi pembahasan di Uni Eropa ialah krisis yang terjadi di Yunani. Yunani yang akhirnya mulai menolak segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa dinilai hanya memperparah permasalahan krisis ekonomi yang melandanya, seperti yang dikatakan Le Pen kepada warga Perancis.

Berdasarkan data yang dilansir kantor statistik Uni Eropa, Eurostat, sekitar 17,4 juta orang tidak memiliki pekerjaan di 17 negara anggota di seluruh Eropa. Jumlah tersebut setara dengan 11 persen populasi. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari capaian pada bulan Maret pada 10,9 persen. Angka pengangguran meningkat drastis seiring ketidakpastian krisis utang Eropa beberapa bulan terakhir. Spanyol menjadi negara yang

paling terdampak dengan peningkatan pengangguran sebesar 24,3 persen. Yunani menguntit di belakang dengan peningkatan 21,7 persen. Sejumlah raksasa ekonomi Eropa juga terkena imbas. Perancis dan Italia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dan ketiga di Eropa juga mengalami peningkatan dalam angka pengangguran hingga 10,2 persen. (Rachman, 2012).

### 2.A.2 Kebijakan Pengetatan Anggaran (*Austerity*)

Kebijakan *austerity* adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan konstitusi Eropa dalam menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Uni Eropa melalui pengetatan anggaran di setiap Negara-Negara di Uni Eropa. Pengetatan anggaran atau austeritas adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang diterapkan dengan tujuan mengurangi defisit anggaran pemerintah. Pengetatan anggaran meliputi pemangkasan belanja, peningkatan pajak, atau campuran keduanya (Farneubun, 2016). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan *austerity* bertujuan untuk mengurangi tingginya angka pengangguran yang terjadi di Eropa dan menjadi masalah internal dalam Uni Eropa.

*Austerity* (Liesindriyati, 2013), yang dimaknai sebagai kebijakan pemangkasan belanja negara dibarengi kenaikan pajak dalam rangka menekan defisit anggaran, dianggap sebagian kalangan hanya akan memperburuk krisis Eropa yang persoalan utamanya adalah krisis utang dan perbankan. Penganut Keynesian meyakini, krisis ekonomi hanya bisa diatasi dengan menggelontorkan stimulus fiskal dengan menggenjot belanja negara untuk menggerakkan ekonomi. Jerman, yang merupakan perekonomian

terkuat zona euro, menentang penggunaan stimulus karena stimulus fiskal hanya bisa dilakukan dengan cara menambah utang. Mengatasi krisis utang dengan menambah utang hanya akan kian memperparah krisis utang Eropa.

Kebijakan *austerity* (Musafir, 2011) sendiri sekaligus dimaksudkan untuk mendisiplinkan negara anggota yang selama ini serampangan dalam belanja anggaran, sebagaimana tecermin dari pembengkakan defisit yang dibiayai dengan utang. Dari 28 negara Uni Eropa, hanya Jerman yang defisit anggarannya di bawah 3 persen, seperti disyaratkan Uni Eropa. Negara lain, termasuk Perancis dan Italia (perekonomian kedua dan ketiga terbesar), jauh di atas 3 persen. Setelah enam tahun berjuang keluar dari krisis ekonomi, stabilitas finansial memang mulai terlihat di zona euro. Namun, perekonomian yang saat ini telah digambarkan oleh pertumbuhan dan pengangguran yang melanda Uni Eropa, masih mengalami penekanan. Pertumbuhan secara keseluruhan di 18 negara pengguna euro memang mulai positif awal 2013. Namun pergerakan ini masih tak cukup kuat dikarenakan masih berada di bawah 1 persen. Bahkan belum ada kesepakatan apakah ekonomi kawasan ini telah keluar dari resesi, mengingat beberapa negara anggota masih resesi. Arah kebijakan Uni Eropa ke depan akan bergantung pada bagaimana para pemimpin Eropa melihat situasi ekonomi saat ini dan sejauh mana kebijakan yang sudah ditempuh dapat memperbaiki fundamental perekonomian kawasan (Kompas, 2014).

Eropa menjalankan *austerity measures* - dengan memotong belanja pemerintah dan menaikkan pajak - pada saat ekonomi mereka masih rapuh. Hal ini memberikan tekanan kepada rumah tangga dan sektor bisnis sehingga mereka terpaksa mengurangi belanja mereka yang berakibat timbulnya lingkaran setan *austerity-recession*. Sementara Amerika Serikat memilih menunggu hingga ekonominya mulai pulih sebelum mereka mengetatkan kebijakan fiskalnya. Dengan demikian pada saat pengetatan dimulai, sektor

perbankan sudah lebih kuat dan deleveraging (pengurangan utang) di pihak swasta juga sudah mereda. *Austerity* menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih parah di Eropa karena negara-negara di zona Euro saling bergantung satu sama lain dalam hal perdagangan dan mereka melakukan *austerity* measures secara bersamaan. Dengan demikian ekspor di negara-negara Eropa sama-sama anjlok dan semua mengalami resesi (Iskandar, 2014).

Pengetatan ekonomi Eropa menjadi sebuah proses kebangkitan partai-partai ekstrem kanan yang ada di Eropa. Karena dengan adanya pengetatan ekonomi tersebut banyak negara-negara di Eropa yang akan semakin terpuruk dalam perkembangan perekonomiannya. Dan disaat inilah banyak masyarakat yang mulai mengeluhkan mengenai kebijakan *austerity* tersebut sehingga para tokoh politik konservatif menjadikannya sebagai momentum kebangkitan dengan menjadi perwakilan masyarakat yang kecewa dan tidak terima akan kebijakan tersebut. Banyaknya negara-negara di Eropa yang mengalami *bail out* setelah diberlakukannya kebijakan tersebut menjadi poin utama bagi masyarakat untuk meminta kepada dewan konstitusi Eropa untuk menghilangkan kebijakan tersebut. Dan bagi para tokoh elit partai konservatif juga adanya kebijakan pengetatan anggaran dinilai sama saja dengan adanya penghapusan kedaulatan negaranya yang seharusnya mempunyai akses penuh dalam perekonomian negaranya masing-masing. Negara yang pertama kali menolak adanya kebijakan *austerity* tersebut ialah Inggris sebelum keluar dari Uni Eropa (*brexit*) serta Perancis dan Italia yang menjadi negara nomor dua dan tiga sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Uni Eropa.

Karena dampak beruntun yang terjadi dalam permasalahan internal Uni Eropa sangatlah berkaitan antara satu sama lain, sebab jika angka pengangguran yang semakin lama semakin meninggi dan ditambah adanya kebijakan pengetatan anggaran oleh dewan

konstitusi akan semakin memperburuk perekonomian negara-negara di Uni Eropa itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh adanya ketergantungan ekonomi antara negara satu dengan negara yang lainnya dimana jika seluruh negara anggota menerima dampak dari permasalahan-permasalahan tersebut bisa jadi negara-negara tersebut akan mengalami kebangkrutan dan menerima konsekuensi *bail out* dari Uni Eropa.

### 2.A.3 Anti-Euro

Sebelum krisis ini terjadi, perjalanan sejarah Uni Eropa sebenarnya nyaris penuh dengan keberhasilan. Tahun 1995 hampir seluruh negara Eropa Barat bergabung. Tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam mata uang tunggal: Euro. Tahun 2004 bertambah lagi 10 negara anggota baru. Mereka adalah negara-negara ex-komunis Eropa Timur. Ini menjadikan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi contoh organisasi regional terbaik di dunia. Wajar saja kalau keberadaannya dikagumi oleh organisasi regional manapun di dunia. Bahkan pada tahun 2012 Uni Eropa mendapatkan hadiah Nobel untuk perannya menyatukan benua biru tersebut (Kusumawardhana, 2013)

Saat ini isu lain yang menjadi masalah internal di Eropa Tahun 2010-2016, ialah munculnya Gerakan Anti Eropa yang semakin kuat, hal itu dikarenakan banyaknya kekecewaan yang timbul dikalangan masyarakat Eropa akan kebijakan-kebijakan yang dibuat selama tergabung dalam Uni Eropa. Krisis mata uang Euro, naiknya angka pengangguran dan ancaman datangnya resesi membuat sentimen anti Eropa meningkat. Partai anti Uni Eropa atau kelompok-kelompok sayap kanan makin banyak meraih

simpati pemilih di sejumlah negara anggota. Seperti yang dilakukan partai AfD Jerman yang menggunakan permasalahan Euro sebagai cara dalam menarik simpati masyarakatnya untuk mendukung partai tersebut dalam pemilu mendatang (DW, 2014).

*“Bersama-sama dengan pihak yang terwakili di sini, kami ingin putra-putra Eropa dari Fatherlands yang bebas,” kata Frauke Petry, pemimpin kelompok Alternatif anti-imigrasi Jerman (AFD) (Wiratama, 2017).*

Ketidakpuasan terhadap Uni Eropa serta gagasan akan integrasi Eropa yang menjadi tujuan utama terbentuknya Uni Eropa kini makin meningkat. Dari ketidakpuasan tersebut petinggi-petinggi Eropa mencoba untuk menanggapi dengan kebijakan politik pengetatan anggaran (*austerity*) malah membuat sentiment anti-Eropa malah semakin kencang. Dalam pemilihan umum di sejumlah negara anggota, terlihat dengan tegas partai-partai yang skeptis terhadap gagasan Eropa serta partai berhaluan kanan, berhasil meraih simpati pemilih. Partai-partai berhaluan populis juga memanfaatkan situasi krisis untuk dapat menduduki kursi parlemen yang ada di Eropa.

Di Inggris, Jerman, Perancis, Belanda dan Denmark partai skeptis-Eropa dan partai ekstrim kanan meraih kepercayaan yang cukup signifikan dalam pemilu parlemen Eropa maupun di tingkat nasional. Sementara di negara yang dilanda krisis keuangan dan beban hutang yang tinggi, seperti Hungaria dan Yunani malah lebih memudahkan untuk partai-partai berhaluan kanan dalam meraih suara-suara yang ada dalam memantapkan posisinya.

Di Spanyol, provinsi Katalan dan di Inggris, Skotlandia juga menggelar referendum untuk menyempal para petinggi-petinggi Uni Eropa, dikarenakan adanya rasa tidak puas dengan pemerintah pusat yang pro-Eropa yang dituding menjadi penyebab ambruknya

ekonomi di Spanyol. Kejutan lainnya yang muncul di Inggris sebelum melakukan referendum dari Uni Eropa, partai anti Uni Eropa-UKIP berhasil meraih dua kursi di parlemen dalam pemilu nasional di Inggris, Kemenangan partai anti Eropa itu merupakan sinyal penting yang serius menjelang pemilu nasional kedepan di Inggris. Partai-UKIP yang mengusung tema anti imigran dan ketidak puasan terhadap peranan Uni Eropa dalam kampanyenya menyakinkan public eropa bahwa saat ini Gerakan anti-euro di Eropa sudah menjadi gerakan utama dalam kebangkitan Negara-Negara di Eropa (DW Indonesia, 2014).

Perahian suara sekitar 20% yang didapat oleh Marine Le Pen sebagai pemimpin Partai Front Nasional di Perancis telah membuktikan bahwa masyarakat di Eropa sekarang mulai bergerak secara perlahan-perlahan kearah gerakan anti-euro karena kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh gerakan anti-euro dinilai dapat mengembalikan tatanan social serta keamanan nasional negara-negara di Eropa. Calon presiden Marine Le Pen dari Partai Front Nasional sudah berjanji untuk menyelenggarakan referendum yang menuntut Perancis keluar dari Uni Eropa dan pemberlakukan mata uang tunggal dalam enam bulan pertamanya jika terpilih sebagai presiden menggantikan Francois Hollande pada pemilihan umum mendatang (Setiawan S. R., n.d.). Hal ini tidak hanya terbukti di Perancis, seperti halnya Perancis Negara lainnya di eropa yaitu Belanda juga membuktikan bahwa gerakan anti-euro sudah menyebar keseluruh penjuru di Eropa, tokoh yang juga terkenal akan kebijakannya yang anti-euro, ialah Geert Wilders.

Setelah pembahasan pengetatan anggaran antara koalisi yang dipimpin Perdana Menteri, Mark Rutte dan kubu Euroskeptis bersama dengan Geert Wilders yang merupakan pemimpin Partai Kebebasan yang anti-Islam (PVV) akhirnya berhasil mengubah skenario politik di Belanda. Wilders, yang pernah menyamakan Alquran



dengan Mein Kampf karya Hitler, bagi Wilders partainya tak bisa sejalan dengan tuntutan para petinggi Uni Eropa. Hal itu dikarenakan alasan adanya pemotongan anggaran demi memenuhi target Uni Eropa sebab kebijakan tersebut hanya akan menyusahkan kaum manula dan pensiunan, sebagai kelompok yang paling terdampak. Dulu negara-negara inti Eropa cemas dengan tren pemilu negara-negara tepi eropa akan menjurus pada anti-Euro. Namun, perkembangan terkini justru menunjukkan kandidat anti-Euro bermunculan di negara-negara inti (Pitakasari, 2012) .

#### **2.A.4. Fenomena Euroscepticism**

*Euroscepticism* yang diartikan dalam kamus internasional sebagai Kelompok Oposisi terhadap skeptisisme atau kekuasaan yang ada di Uni Eropa saat ini (Kamus Internasional, 2017). Istilah *eurosceptic* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk orang-orang Eropa yang meragukan keberadaan Uni Eropa, *eurosceptic* berasal dari dua kata yang digabungkan menjadi satu yaitu Euro dan Skeptic, Euro memiliki arti Eropa, dan Skeptic memiliki arti orang yang suka meragui sesuatu, maka secara sederhana *eurosceptic* dapat diartikan dengan orang-orang Eropa yang meragukan atau menolak adanya integrasi di Eropa. Sedangkan jika merujuk pada kamus Cambridge, *eurosceptic* memiliki arti : kata benda, yaitu berupa seseorang, terutama politikus, yang menentang hubungan dekat antara Inggris dan Uni Eropa (Repository UMY , 2016).

*Euroscepticism* yang merupakan istilah yang menyatakan pandangan maupun kepercayaan skeptis terhadap integrasi Uni Eropa tersebut. Data survey Eurobarometer dari tahun 1990 hingga 2011 menunjukkan adanya peningkatan persepsi publik yang

mengatakan bahwa unifikasi negara terhadap Uni Eropa adalah hal yang buruk. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pandangan skeptis terhadap Uni Eropa diantaranya adalah ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, ketidakpercayaan terhadap institusi supranasional, kekhawatiran terhadap hilangnya identitas nasional, dan refleksi terhadap kepentingan pribadi. *Euro scepticism* pada dasarnya didorong oleh kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan negara anggota (Tidore, 2017).

*Euro scepticism* semakin meningkat ketika krisis ekonomi melanda Uni Eropa sehingga rakyat Eropa mulai menyalahkan European Central Bank (ECB) atas intervensi yang dilakukan dalam mengatur kebijakan fiskal negaranya seperti kebijakan mengenai standar pembayaran pajak, upah pensiun hingga lapangan pekerjaan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan asas demokratis mengingat anggota parlemen Uni Eropa yang membuat kebijakan pada dasarnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat Uni Eropa itu sendiri, melainkan oleh politikus elit di pemerintahan.

Ditambah lagi banyaknya permasalahan-permasalahan internal yang terjadi didalam Uni Eropa itu sendiri semakin menguatkan fenomena *euro sceptic* sebagai fenomena yang muncul dikarenakan adanya kekecewaan yang dialami oleh masyarakat eropa. Sejak tergabungnya negara-negara di Uni Eropa banyak kebijakan yang dinilai skeptis oleh para tokoh politik ataupun individu-individu lainnya seperti bertambahnya angka pengangguran di seluruh negara di Eropa karena banyaknya persaingan tidak sehat yang dilakukan sesama negara anggota ditambah dengan munculnya kebijakan *austerity* yang menjadikan negara-negara yang sebelumnya saling bergantung satu sama lain kini malah mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk disebabkan adanya resesi ekonomi negara.

Dan dari adanya permasalahan tersebut menjadikan fenomena *euroseptic* di kalangan masyarakat eropa juga sering dikaitkan dengan kegagalan penyatuan eropa yang dinilai belum mampu membuat sistem yang dapat menjangkau seluruh negara anggotanya. Marine Le Pen yang pada saat kampanyenya dalam pemilihan umum di Perancis mengajak negara anggota lainnya untuk dapat melihat dan menjadikan contoh kebebasan Inggris (*brexit*) sebagai proses pengambilan kembali kebebasan yang telah diambil sejak negara bergabung dalam Uni Eropa.

*“Kemenangan bagi kebebasan. Seperti yang telah saya minta selama bertahun-tahun, kita sekarang harus menggelar referendum yang sama di Perancis dan negara UE lainnya,”* kicau pemimpin sayap kanan Perancis, Marine Le Pen (Kompas Cyber Media, 2016).

Di Belanda, seperti halnya juga di Perancis - salah satu dari enam negara pendiri komunitas Eropa itu-tokoh anti-Islam dan anti-imigran, Geert Wilders, mengucapkan selamat kepada warga Inggris atas “Hari kemerdekaan” mereka keluar dari UE. Hal itu merupakan upaya atau cara Wilders dalam mengajak paara individu-individu di eropa untuk bangkit dan mendukungnya menjadi perwakilan aspirasi masyarakat eropa terkhusus di Belanda.

*“Rakyat Belanda layak juga menggelar referendum. Oleh sebab itu Partai Kebebasan (PVV) menuntut referendum Nexit, Belanda keluar keluar UE,”* kata Wilders (Kompas Cyber Media, 2016)

Kemudian dari negara besar lainnya juga muncul ajakan kepada warga negaranya untuk menjadikan fenomena *brexit* di Inggris sebagai cara paling efektif dalam mengambil kembali kedaulatan yang dirasa telah diambil oleh Uni Eropa. Matteo Salvini

sebagai salah satu tokoh politik paling menonjol dari partai ekstrem kanan tersebut ikut mengajak seluruh masyarakat di Italia agar mencoba untuk melakukan referendum kepada Uni Eropa seperti yang dilakukan oleh Inggris.

## **B. Faktor Eksternal Di Eropa Tahun 2010-2016**

### **2.B.1 Meningkatnya Imigran-Imigran Non Eropa**

Banyaknya peperangan-peperangan serta konflik yang terjadi di Negara-Negara Islam di Timur Tengah mengakibatkan banyaknya warga-warga Muslim yang mencari tempat-tempat baru yang dirasa aman untuk di tinggali sehingga memaksa warga-warga Muslim untuk bermigrasi ke negara-negara di Eropa. Dari kejadian tersebut berkaitan dengan konsep gerakan sosial (*social movement*) yang menggambarkan resistensi suatu kaum / kelompok yang memperjuangkan tidak hanya isu sosial, politik, dan ekonomi, tetapi meluas mencakup isu HAM dan kebebasan individu, pengaruh globalisasi dan lain sebagainya. Dengan banyaknya imigran-imigran non-eropa yang dating ke Negara-Negara di Eropa membuat sebuah permasalahan yang melanda di Negara-Negara di Eropa.

Isu tersebut juga sering dijadikan oleh para tokoh-tokoh elit sayap kanan untuk menarik partisipan-partisipan baru bagi partai mereka. Seperti yang dikemukakan partai AfD di Jerman, Partai Alternatif untuk Jerman semula menuntut dibubarkannya zona mata uang Euro. Untuk menarik simpati banyak pemilih, AfD memilih retorika sebagai partai populis kanan dan memberi tekanan khusus pada program anti Islam. AfD juga gelar kampanye anti Yahudi dan sentimen rasisme. Inilah resep yang membuat AfD

sukses meraih kursi di parlemen Jerman dan parlemen Eropa (DW, 2013). Frauke Petry juga menjadikan isu imigran-imigran non-eropa yang masuk ke Jerman sebagai cara untuk mengambil simpati para pemilih.

Ia merasa dengan adanya 1,1 juta pengungsi yang masuk ke Jerman, ia mengatakan *“People must stop migrants from crossing illegally from Austria [into Germany],” she said in an interview with a regional newspaper. “If necessary, [they] should use firearms. I don’t want this, but the use of armed force is there as a last resort”* (Connolly, 2016). Ia mengajak seluruh masyarakat Jerman untuk tidak memberikan kesempatan bagi para pengungsi yang menebarkan teror di Jerman, ia bahkan siap menggunakan cara kekerasan yaitu dengan memperbolehkan penggunaan senjata api terhadap para imigran ketika melakukan kegiatan yang dinilai dapat mengancam keamanan negara.

Di Belanda juga ada Geert Wilders sebagai tokoh politik sayap kanan yang telah hidup di persembunyian sejak seorang militan Islamis membunuh produsen film Belanda Theo Van Gogh pada 2004. Dia bertekad untuk melarang masuknya warga Muslim, menutup semua masjid, dan menarik keanggotaan Belanda dari Uni Eropa (Manan, 2016). Geert Wilders yang sangat terkenal akan sikap anti-Muslim dan anti-euro selalu mengupayakan cara agar seluruh masyarakat di Belanda dan Eropa dapat memperhitungkan kembali sikap pemerintah Uni Eropa yang menerima para imigran-imigran tersebut.

Perancis sebagai negara yang paling terdampak akan isu radikalisme islam tersebut telah mulai terlihat adanya rencana kebijakan nasional negara tersebut dalam menyelesaikan permasalahan imigran non-eropa seperti yang dikemukakan Marine Le Pen *“Mass immigration is not an opportunity for France, it’s a tragedy for France”*

(Kettley, 2016). Yang artinya "Imigrasi massal bukanlah kesempatan bagi Perancis, ini adalah tragedi bagi Perancis." Karena bagi Le Pen dengan banyaknya imigran-imigran Muslim akan berdampak kepada hilangnya identitas nasional Perancis seperti yang terdapat dalam paham konservatif.

Dalam empat dekade mendatang, Islam diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan agama besar lainnya di dunia, dengan populasi Muslim yang hampir menyamai Kristen baik dalam jumlah maupun persentase dalam populasi global, menurut perkiraan-perkiraan yang dirilis pekan lalu. Kristen akan tetap menjadi kelompok agama terbesar, meningkat menjadi 2,92 miliar penganut pada 2050 jika tren-tren demografis saat ini berlanjut. Namun jumlah Muslim akan mencapai 2,76 miliar orang, membuat masing-masing kelompok akan mencakup 30 persen populasi dunia, menurut para analis dari Pew Research Center.

Proyeksi-proyeksi dalam laporan "Masa Depan Agama-Agama Dunia" itu didasarkan pada angka kelahiran dan kematian, pola imigrasi dan tingkat kepindahan agama, di antara informasi lain yang ditemukan dalam sensus-sensus, survei demografi dan laporan tambahan yang menanyai orang-orang untuk mengidentifikasi agama yang mereka anut. Pertumbuhan agama Kristen dan Islam akan banyak terjadi di Afrika. Namun Muslim juga akan tumbuh untuk mencakup 10 persen populasi Eropa dan akan melebihi jumlah Yahudi di Amerika Serikat pada pertengahan abad. India diperkirakan akan tetap dengan mayoritas Hindu, namun negara itu akan melewati Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai sebuah kelompok, Muslim lebih muda dan memiliki lebih banyak anak dibandingkan umat agama lain, mendorong pertumbuhan global mereka, menurut para peneliti. (Islam, 2015)

Hal inilah yang menimbulkan ketakutan kepada seluruh petinggi-petinggi di Eropa dalam menatap perkembangan umat Muslim. Terlebih arah pertumbuhan tersebut telah mengarah ke wilayah-wilayah di Eropa yang dikenal sebagai kiblat utama umat kristiani dan juga menjadi pilar terbesar pendukung Negara-Negara barat saat ini. Dengan ketakutan tersebut sangat bersinergi dengan sikap masyarakat di Negara-Negara Eropa yang merasa terancam dengan banyaknya masyarakat yang non-eropa masuk ke Eropa dan mengusik identitas nasional serta keamanan nasional di Negara-Negara Eropa. Berikut ini adalah tabel yang mendata masuknya imigran Ilegal di 4 negara di Eropa yaitu Italia, Spanyol, Malta dan Yunani sebagai Negara yang pernah mengalami krisis ekonomi di Eropa (Inglehart, 2004).

### **2.B.2 Serangan Kelompok-Kelompok Militan Islam**

Banyaknya serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok militan Islam dalam memerangi perilaku diskriminasi pemerintah Perancis juga menjadi salah satu indikator penyebab kelompok sayap kanan dapat kembali menguasai percaturan politik di Negara-Negara di Eropa. Seperti halnya program-program yang terdapat dalam 144 program Marine Le Pen (Marine, 2017) pada pemilu di Perancis, ia berharap agar seluruh masyarakat dapat mengikuti program yang terdapat pada poin ke 28 hingga ke 33 dimana pada poin tersebut Marine Le Pen sangat menekankan isu fundamentalis islam yang kemudian dikaitkan kepada isu terorisme.

Ia juga berjanji akan melarang dan membubarkan organisasi apapun yang berhubungan dengan fundamentalis Islam. Mengusir semua orang asing terkait dengan

fundamentalisme Islam dan dalam poin selanjutnya Marine Le Pen juga dengan serius akan menutup semua masjid ekstrimis yang mana nantinya akan diidentifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan melarang dana asing dari tempat ibadah dan staf mereka.

Terlebih paska penyerangan di Paris yang menewaskan sekitar 128 orang tewas dan 200 cedera dalam serangan terkoordinasi di berbagai lokasi di kota Paris pada November 2015 (Islamnesia, 2015). Le Pen mengatakan pada seluruh media *“We are living the horror, yesterday evening the centre of France was struck by an exceptional barbarity. It was an escalation of Islamist terrorism and the sixth time this year that Islamists have attacked our country”* (Willsher, 2015), Le Pen bertujuan untuk memprovokasi seluruh masyarakat Perancis dengan aksi serangan tersebut karena bagi Le Pen kelompok "Ekstremisme Islam harus dihancurkan," dan dengan cara tersebut ia mendapat dukungan penuh masyarakat sebagai orang yang memperhatikan keresahan akan serangan tersebut. Inilah mengapa banyak sekali serangan-serangan teror yang terjadi menjadi bahan pempolitisasian para tokoh konservatif di Eropa.

Begitu juga ketika serangan terjadi di London, 2005 dan Brussel, 2014 tokoh konservatif lainnya yaitu Geert Wilders dari Partai PVV Belanda mengajak seluruh masyarakat Belanda agar dapat melihat kejadian tersebut sebagai salah satu contoh yang akan terjadi apabila Belanda masih tetap memberikan kesempatan bagi kelompok fundamentalis islam untuk berkembang di Belanda dan Eropa. Geert Wilders juga menyampaikan pesannya kepada media saat wawancaranya kepada telegraph.uk *“What you see happening now is what we saw happening after Brexit,”* and *“Despite all the hate and fear-mongering of the elite, both in Britain and in Brussels, the people took their fate in their own hands”* (Boztas, 2017). Wilders mengingatkan bahwa yang terjadi di Inggris



dan Belgia bukan semata-mata tindak kejahatan biasa melainkan cara kelompok ekstrem islam dalam merebut identitas nasional dari masyarakat eropa.

Wilders juga menekankan bahwa serangan tersebut dapat diselesaikan dengan cara memberikan dukungan kepadanya dalam pemilu Belanda mendatang karena menurut Wilders, lemahnya sikap pemerintah Belanda dalam membendung kedatangan imigran Muslim dapat berdampak kepada serangan terorisme yang telah terjadi di negara-negara Eropa lainnya. Betapa bahayanya jika negara yang menempati 3 besar dalam perekonomian di Uni Eropa akan mengalami serangan teror yang dapat mengakibatkan negara tersebut menjadi krisis keamanan nasional.

Berbeda halnya dengan Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang lebih memilih cara dalam memanfaatkan serangan-serangan teror yang terjadi di hampir seluruh kota besar di negara anggota Uni Eropa. Partai AfD bersama ketua partainya Frauke Petry mengadopsi sebuah manifesto baru yang kontroversial yang menyerukan pelarangan menara, kerudung untuk wanita dan panggilan Muslim untuk sholat (adzan). "*Islam bukanlah bagian dari Jerman,*" partai tersebut mendeklarasikan dalam manifesto pertamanya untuk pemilihan nasional. (Justin Huggler, 2016)

### **2.B.3 Fenomena Islamophobia**

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Qobidl 'Ainul Arif dalam bukunya yang berjudul "*Politik Islamophobia Eropa*" bahwa Islamphobia adalah perasaan ketakutan atau kebencian terhadap Islam, orang – orang Islam (Muslim) maupun budaya Islam. Istilah ini muncul pertama kali dalam kurun waktu tahun 1922 dalam sebuah esai seorang

orientalis bernama Etienne Dinet dalam karyanya yang berjudul *L'Orient vu del'Occident*. Islamophobia kemudian menjadi istilah yang umum digunakan pada tahun 1990an untuk mendefinisikan perlakuan diskriminasi yang diterima oleh umat Muslim di Eropa Barat (Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, 2014). Meskipun berbagai macam definisi mengenai Islamophobia namun semua persepsi tersebut tetap saja mengarah ke satu ideology tentang ketakutan yang tidak rasional terhadap Islam. Dan dari persepsi inilah memunculkan cap akan setiap umat Muslim adalah seorang yang fanatif dengan agamanya dan dapat melakukan tindakan kekerasan kepada orang – orang non-Muslim dan meyakini bahwa Islam menolak akan nilai – nilai yang ada di Negara barat seperti kesetaraan, toleransi, dan demokrasi.

Di tahun 1997, the Runnymede Trust, sebuah kelompok think-tank Inggris yang sangat berpengaruh menerbitkan sebuah laporan berjudul *“Islamophobia: A Challenge for Us All.”* Dalam laporan tersebut disebutkan ada sikap kebencian dan permusuhan terhadap Islam karena itu masyarakat Eropa tidak menyukai semua kelompok Muslim. Fenomena ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1970 dan sekarang memuncak menjadi fenomena sosial di seluruh negara-negara Eropa.

Sikap Islamofobia di Eropa terlihat jelas pada Partai British National Party (BNP) di Inggris, yang menggunakan isu sebagai kampanye politik. Di Belanda Geert Wilders juga menggunakan cara-cara seperti ini dalam pemilihan anggota parlemen bagi partainya, Party For Freedom (PVV), atau Partij voor de Vrijheid. Begitu pula di negara tetangganya, Belgia dan Swedia juga menampakkan gejala serupa (Nurdin, 2015).

Demikian pula di Perancis Partai Front National yang dipimpin oleh Marine Le Pen dengan jelas menyuarakan akan sikap anti-islamnya terbukti dari 144 manifesto program-

program Le Pen (Marine, 2017) dalam pemilihan umum di Perancis. Marine Le Pen juga menambahkan pada Huffington Post "*Untuk memberantas terorisme dan melanggar jaringan fundamentalis Islam*" - "*Eradiquer le terrorisme et briser les réseaux fondamentalistes islamistes*" (Huffington Post, 2016). Le Pen menjelaskan akan menerapkan sikap keras terhadap Muslim di Perancis sesuai dengan programnya yang terdapat pada poin 25-35 karena bagi Le Pen Muslim hanya dapat memberikan teror kepada masyarakat Perancis kedepannya.

Partai Lega Nord Italia yang dipimpin oleh tokoh politik sayap kanan Matteo Salvini juga menekankan bahwa fenomena Islamophobia telah mengakibatkan adanya perang identitas dan kebudayaan, seperti yang ia katakan pada laporan berita Breitbart.com yang berjudul "*Europe 'Soft', Islam Incompatible with Our Values*". Salvini mengatakan "*Europe is losing its values and identity, it's lacking security and has lost its sense of pride*", Salvini said, and spoke of a "*culture war*" taking place on the continent"(Hale, 2017). Dimana Salvini mencoba berbicara mengenai "perang budaya" yang terjadi di benua Eropa. Karena banyak proses multikulturalisme yang dilakukan umat Muslim dinilai terlalu ekstrem dan sangat fundamentalis.

Sebagaimana Inggris, Perancis maupun Spanyol, hal yang sama juga terjadi terhadap komunitas Muslim di Jerman, sikap diskriminasi ini ditunjukkan oleh warga Jerman dengan melakukan pelarangan pada kelompok Muslim untuk membangun menara masjid kecil yang tingginya 8 meter. Editorial koran Saarbrücker Zeitung menyebutkan. "Menara ini tidak boleh didirikan, karena menara menyimbolkan pencarian Islam akan kekuasaan. Menara awalnya dipakai sebagai menara jaga, namun kemudian menjadi simbol keagamaan. Lalu diikuti dengan pencaplokan wilayah-wilayah dengan kekerasan, menara dibangun sebagai manifestasi kekuasaan Muslim." Demikian, editorial

menggambarkan sikap sebagian masyarakat Jerman terhadap Islam maupun Muslim. Sikap kebencian negara-negara Barat ini terhadap Islam maupun kaum Muslimin sampai pada puncaknya di Amerika ketika sekelompok orang di Amerika Serikat yang dipelopori oleh seorang pendeta Terry Jones untuk membakar Al-Qur'an dalam rangka memperingati peristiwa 11 September 2001 (Abadi, 2013).

Ibrahim Kalin, cendekiawan Muslim dari Georgetown University, dalam esainya berjudul *"Islamophobia dan Batas Multikulturalisme,"* mengatakan perdebatan tentang Islam di Eropa merupakan dampak dari kepanikan masyarakat Eropa terhadap isu multikulturalisme. Isu tersebut mengambinghitamkan perkembangan populasi Muslim di Eropa. Berbagai macam bentuk perlawanan dan aksi yang dilakukan oleh para imigran ataupun masyarakat non-eropa terhadap perlakuan diskriminatif tersebut merupakan bentuk dari efek gerakan sosial. Hal tersebut sejalan dengan perpesktif teori Tilly tentang gerakan sosial yakni

*"Social movements as a series of contentious performances, displays and campaigns by which ordinary people make collective claims on others... social movements are a major vehicle for ordinary people's participation in public politics* (Syawaludin, 2014).

Tilly menegaskan bahwa gerakan sosial sebagai "rangkaiian interaksi berkelanjutan (sustained series of interactions)" antara otoritas dengan para penantanganya yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi khusus. Tuntutan-tuntuan yang dimaksud disini ialah perasaan akan perlindungan hukum yang telah jelas dalam lembaga Uni Eropa guna mengawasi serta mendukung perlindungan HAM

**Daftar Pustaka**

- Abadi, K. (2013). HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA BERPENDUDUK MINORITAS MUSLIM (Studi Hukum Keluarga di Inggris). *1066-2062-1-PB*, 6.
- Armandhanu, D. (2015, Juli 06). *Reuters*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150706080951-134-64537/para-pembenci-uni-eropa-gembira-atas-keputusan-yunani/>
- Asep Syamsul M. Romli, S. (2000). *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy'ari, D. A. (2011, Januari). Menjawab Sikap Islamophobia. (Shoifah, Ed.) Retrieved from <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://eprints.umm.ac.id/434/1/011.pdf>
- Boztas, T. R. (2017, Februari 18). *telegraph.co.uk*. Retrieved from Geert Wilders attacks 'Moroccan scum' as he launches election campaign: <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/18/geert-wilders-attacks-moroccan-scum-launches-election-campaign/>
- Burke, E. (1968). *Reflection on the Revolution in France*. London: Conor Cruise O'Brien.
- Chrissandi, I. (2016). DAMPAK SIKAP JERMAN TERHADAP KRISIS PENGUNSI BAGI KEAMANAN REGIONAL DI EROPA. *SKRIPSI BAB I, BAB III, dan BAB V*, 24-25.
- Connolly, K. (2016, Februari 7). *The Guardian*. Retrieved from Frauke Petry: smiling face of Germany's resurgent right | World news: <https://www.theguardian.com/world/2016/feb/07/frauke-petry-smiling-face-resurgent-right>
- Denny, J.A. (2006). *Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik*. (F. Surdiansis, Ed.) Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- DW. (2013). Retrieved Agustus 8, 2017, from DW.com: <http://www.dw.com/id/7-fakta-afd-partai-anti-islam-di-jerman/g-38566275>
- DW. (2014). *Deutsche Welle*. Retrieved from dw.com: <http://www.dw.com/id/7-fakta-afd-partai-anti-islam-di-jerman/g-38566275>
- DW Indonesia*. (2014, 11 21). Retrieved from Deutsche Welle (DW): <http://www.dw.com/id/gerakan-anti-eropa-makin-kuat/a-18077945>
- Eurostat. (2013). *Euro Area GDP Growth Rate*. [www.TradingEconomics.com](http://www.TradingEconomics.com).
- Farneubun, P. K. (2016, April 27). European Union Financial Crisis: A Marxist Analysis. *2252-6137-1-SM*, 1-7. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.18196/hi.2016.0086.60-66>
- Hale, V. (2017, Januari 3). *Breitbart*. Retrieved from Matteo Salvini: Europe 'Soft', Islam is Incompatible with Our Values: <http://www.breitbart.com/london/2017/01/03/salvini-islam-incompatible-europe-soft/>
- Huffington Post*. (2016). Retrieved from Le programme de Marine Le Pen à l'élection présidentielle 2017: [http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/23/le-programme-de-marine-le-pen-a-lelection-presidentielle-2017\\_a\\_22050706/](http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/23/le-programme-de-marine-le-pen-a-lelection-presidentielle-2017_a_22050706/)
- Inglehart, P. N. (2004). *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. (I. Ali-Fauzi, Ed., & Z. Rofiqi, Trans.) Tangerang: Pustaka Alvabet.

- IRIB, I. (2013, April 9). *IRIB*. Retrieved from [http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/61467-Dampak\\_Peningkatan\\_Angka\\_Pengangguran\\_di\\_Eropa](http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/61467-Dampak_Peningkatan_Angka_Pengangguran_di_Eropa)
- Isharyanto. (2017, Maret 10). *Kompasiana*. Retrieved from <http://www.kompasiana.com/isharyanto/menengok-partai-nasionalis-sayap-kanan-di-eropa>
- Iskandar, W. N. (2014). Faktor Sosial dan Ekonomi sebagai Penyebab Peningkatan Respon Anti-Imigran di Norwegia Tahun 2008-2011. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 707-720.
- Islam, P. C. (2015, November 27). *Berita Islam Terkini, Budaya dan Islam*. Retrieved from <https://islamislami.com/2015/11/27/26420/>
- Islamnesia*. (2015, September 14). Retrieved from <http://islamnesia.com/2015/11/rangkaian-serangan-di-eropa-sejak-11-tahun-terakhir-ini-daftarnya/>
- Ismoyo, P. J. (2016, Oktober). ISLAMOFobia Di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghrabi. *667-1712-1-SM*.
- Jazilah, M. M., F. P., Susilo, D., & Eriyanti, L. D. (2012). Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1-7.
- Justin Huggler. (2016, Mei 1). *The Telegraph*. Retrieved from Far right AfD party says Muslims not welcome in Germany: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/01/far-right-afd-party-says-muslims-not-welcome-in-germany/>
- Kamus Internasional*. (2017). Retrieved from [http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian\\_word=Euroscepticism](http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=Euroscepticism)
- KBBI*. (2017, Maret 4). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia: <http://kbbi.web.id/konservatif.html>
- Kettley, S. (2016). *Express UK*. Retrieved Agustus 7, 2017, from What is Marine Le Pen's programme? What are her French election policies?: <http://www.express.co.uk/news/world/796483/French-elections-2017-Marine-Le-Pen-programme-policies-manifesto>
- Kompas*. (2014, Juni 21). Retrieved from [http://print.kompas.com/KOMPAS\\_ART00000000000000000007362075](http://print.kompas.com/KOMPAS_ART00000000000000000007362075)
- Kompas Cyber Media. (2016, April 24). *Kompas*. Retrieved from Kompas Internasional: <http://internasional.kompas.com/read/2016/06/24/18264701/dampak.brexit.kaum.eurosceptic.serukan.keluar.dari.uni.eropa>
- Kusuma, M. S., Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. M., & I Made Budi Arsika, S. L. (2013, September 25). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM ATAS PERLAKUAN DISKRIMINATIF DI UNI EROPA. *8066-14309-1-SM*, 1-5.
- Kusumawardhana, I. (2013). European Union in Crisis :Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Uni Eropa. *Jurnal S2 Indra Kusumawardhana*, 1-22.
- Liesindriyati, S. O. (2013). KEPUTUSAN UNI EROPA MEMBERIKAN FINANCIAL ASSISTANCE PACKAGE KEPADA YUNANI PADA TAHUN 2010. *SKRIPSI*, 1-14.
- Manan, J. (2016). *Geert Wilder Desak Warga Belanda Rebut Kembali Negara Mereka*. Retrieved Agustus 8, 2017, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/geert-wilder-desak-warga-belanda-rebut-kembali-negara-mereka/3731655.html>
- Marine*. (2017, April 23). Retrieved from [marine2017.fr](http://marine2017.fr): <https://www.marine2017.fr/programme/>

- Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, M. (2014). *Politik Islamophobia Eropa*. Yogyakarta: Deepublish (CV.Budi Utama).
- Musafir, R. (2011). FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UNI EROPA DALAM USAHA PERBAIKAN EKONOMI DAN POLITIK DI YUNANI. *Resume SKRIPSI*, 1-31.
- Nurdin, M. A. (2015, Juli). Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia di Negara-Negara Barat. *4841-11709-1-SM*, 2.
- Pitakasari, A. R. (2012, April 23). *Republika*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/04/23/m2x8nz-tren-politik-eropa-digoyang-ekstremis-kanan-antieuro>
- Rachman, T. (2012, Juni 01). *Republika*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/06/01/m4xpc8-pengangguran-di-uni-eropa-capai-11-persen-populasi>
- Repository UMY . (2016). DINAMIKA PERKEMBANGAN EUROSCEPTIC DI UNI EROPA DAN REFERENDUM INGGRIS TAHUN 2016. *SKRIPSI BAB III* , 1-22. Retrieved from [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjym62Rz\\_3SAhVFf7wKHZ6wCi4QFggBMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.umy.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F7805%2FG.%2520BAB%2520III.pdf%3Fsequence%3D7%26isAllowed](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjym62Rz_3SAhVFf7wKHZ6wCi4QFggBMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.umy.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F7805%2FG.%2520BAB%2520III.pdf%3Fsequence%3D7%26isAllowed)
- Setiawan, S. R. (n.d.). *Kompas*. Retrieved from Kompas Internasional: <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/05/053955426/setelah.brexit.akan.muncul.frexit>.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Indonesia: Grasindo.
- Syawaludin, M. (2014, Oktober). PERLAWANAN PETANI RENGAS TERHADAP PTPN VII DI OGAN ILIR SUMATERASELATAN. *1134-2223-1-PB, Volume 9*, 123.
- Tidore, M. D. (2017). DINAMIKA REFERENDUM INGGRIS DI UNI EROPA ; STUDI KASUS: REFERENDUM BREXIT. *SKRIPSI*, 20-22.
- Triesanto Romulo Simanjuntak, S. M., & Drs Dafri Agussalim, M. (2013). SIKAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA DALAM MENANGANI KRISIS YUNANI (Studi Kasus : Sikap Jerman, Perancis dan Inggris). *61-116-1-SM*, 11.
- Wardhani, B. (2011, Desember). Nasionalisme dan Etnisitas di Eropa Kontemporer. *Wardhani - Nasionalisme dan Etnisitas di Eropa Kontemporer, Global & Strategis*, 217-236.
- Willsher, K. (2015, November 14). *The Guardian*. Retrieved from Front National has chance to take centre stage after Paris attacks | World news: <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/paris-terror-attacks-fn-far-right-le-pen-front-national>
- Wiratama, R. (2017, Januari 21). *Partai-partai Sayap Kanan Eropa Sambut Positif Rencana Kebijakan Trump*. Retrieved from Nusantara News: <https://nusantara.news/partai-partai-sayap-kanan-eropa-sambut-positif-rencana-kebijakan-trump/>